



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**RENCANA
KERJA TAHUN 2022**

JAYAPURA, 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga atas berkah dan rahmatNya, Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini, merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 diharapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur

Jayapura,

2021


Kepala Biro,
DEBORA D. SALOSSA, S.Hut, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19771223 200212 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020	5
2.1. Hasil Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020.....	6
2.2. Analisa Kinerja Tahun 2020	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022	19
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	20
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	21
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....	22
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	23
BAB IV. PENUTUP	46

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan jasa sebagaimana prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan guna menjamin tercapainya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terbuka, transparan, akuntabel dan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua maka diperlukan suatu perencanaan yaitu Rencana Kerja Tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi dan dapat menjawab visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Papua.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, tahun 2019-2023.
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai Dukumen Perencanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 yaitu :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022.
2. Sebagai sarana pengendalian progra dan kegiatan Tahun 2022;
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang memuat uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU yang memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun n-1, analisa kinerja tahun n-1, isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN memuat tujuan dan sasaran Renja dan program kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

2.1. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Dalam mendukung rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Papua Tahun 2020 guna mewujudkan pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu “*PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN*” dengan misi ke 3 “*Penguatan Tata Kelola Pemerintahan*”, maka sesuai tujuan strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua yaitu “*Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas untuk menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Papua.*” Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang memuat 5 program dan 30 Kegiatan dengan capaian realisasi output dan outcome sebesar 100%. Rincian capaian setiap program dan kegiatan terlihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel. 2.1.

Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020

KODE PROG./KEG.	PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	REALISASI CAPAIAN TARGET		
				Fisik	%	
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor				100	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1000 Surat	1000	100	
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis dan alat kebersihan	10 jenis	10	100	
		Jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan	2 orang	2	100	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	24 Jenis	24	100	
11	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan	3 jenis	3	100	
		Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	5 jenis	5	100	
		Jumlah penggandaan	15000 lembar	15000	100	
15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 buku	5	100	

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

	17	Penyediaan Makan Minun	Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat	10800 kali tahun	10800	100
			Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	800 orang	800	100
	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Jumlah kordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	80 Kali	80	100
	19	Penyedia Jasa Pengamanan	Pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam	48 orang bulan	48	100
	2	Program Peningkatan Saran Dan Prasarana Aparatur				100
	5	Pengadaan kendaraan Dinas operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit	1	100
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan	1 Unit	1	100
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan perlengkapan	1 Unit	1	100
	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	10 Unit	10	100
	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Fasilitas1 sewa	1 Tahun	1	100
	24	Pemeliharaan Ruti/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	3 unit		100
			Sewa kendaraan	12 bulan	100	100
	26	Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerengkapan Gedung Kantor	Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	1	100
	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100
	4	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	Jumlah apratur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 Orang	40	100
	11	Pendampingan OAP	Jumlah orang	50 Orang	50	100
	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				100
	1	Penyusunan Capaian Laporan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	12	100
	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1	100
	5	Penyusunan Renja, RKA Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	3	100
	115	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Barang Dan Jasa				100
	1	Peningkatan Pelayanan Barang Dan Jasa	Jumlah user barang dan jasa yang terlayani	35 Unit	35	100
	2	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Konsultasi	Jumlah user jasa konstruksi dan konsultasi yang terlayani	35 unit	35	100
	3	Pendampingan Hukum Dan Sanggah	jumlah masalah hukum yang didampingi	1 Laporan	1	100
	5	Monitoring Dan Evaluasi (MONEV) Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah onitoring yang dialkscanakan	25 Lokasi	25	100
	6	Pendampingan Perencanaan Pengadaan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	4 Dokumen	4	100

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

	8	Pembinaan UKPBJ	Jumlah UKPBJ yang dibina	29	29	100
	10	Peningkatan Kapasitas LPSE	Jumlah aparaturnya LPSE yang ditingkatkan	20 Orang	20	100
	11	Peningkatan Jaringan Dan Jasa Layanan LPSE	Sewa jaringan Bandwidth yang diadakan	12 Bulan	12	100
	12	Pengembangan Registrasi Dan Verifikasi Pengguna SPSE Jayapura	Jumlah perusahaan pengguna SPSE yang teregistrasi dan terverifikasi	3000 Perusahaan	3000	100
	13	Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik	Jumlah SKPD pengguna SPSE yang terlayani	40 SKPD	40	100
RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%)						100

Dari total anggaran yang dikelola Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua TA. 2020 sebesar Rp. 32.410.336.870 (tiga puluh dua milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh rupaiah) terealisasi sebesar Rp. 31.026.014.584 (tiga puluh satu milyar dua puluh enam juta empat belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 95,73% dan rata-rata realisasi fisik pelaksanaan APBD Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua TA. 2020 sebesar 96,06% terdiri dari realisasi fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 76,69% dan realisasi fisik Belanja Langsung sebesar 100%. Realisasi keuangan per program dan kegiatan TA. 2020 secara rinci terlampir dalam lampiran laporan ini. Progres realisasi anggaran dan fisik pelaksanaan APBD Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 terlihat pada tabel. 2.2.

Tabel. 2.2.

**Realisasi Pelaksanaan APBD Biro Pengadaan Barang Dan Jasa SETDA
Provinsi Papua TA. 2020**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	%	FISIK %
5	BELANJA		32.410.336.870,00	31.026.014.584,00	95,73	96,06
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	5.481.212.870,00	4.203.632.759,00	76,69	76,69
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	30	26.929.124.000,00	26.822.381.825,00	99,60	100,00

Dari tabel 2.2. diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD TA. 2020 telah sesuai target yang ditetapkan. Kondisi di tahun 2020 meskipun pelaksanaan kegiatan dihadapkan dengan situasi pandemi Covid 19, namun demi pencapaian target kinerja dan pelayanan publik yang profesional khususnya fasilitasi pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa semua dapat terlaksana dengan baik sehingga proses tender/seleksi pengadaan barang dan jasa di tahun 2020 berjalan dengan lancar.

2.2. ANALISA KINERJA TAHUN 2020

2.2.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

1. Capaian Target Indikator Kerja Utama

a. Sasaran Strategis “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran

Tabel. 2.3

Target dan Realisasi Capaian Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran	Persentase Realisasi Program dan Anggaran yang sesuai dengan Perencanaan (%)	89,94	100	95,73

Realisasi capaian target sasaran terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran dilihat dari aspek persentase realisasi program dan anggaran sesuai dengan perencanaan terlihat pada tabel 2.3. sebesar 95,73%. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 89,94%. Capaian realisasi pada sasaran ini “Sangat Baik”

Dalam mendukung capaian tersebut yaitu terlaksananya Perubahan APBD Tahun 2020 dan Rencana Kerja dan RKA APBD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dimana penyusunan Renja dan RKA Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Permendagri

Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Renja dan RKA 2021 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

- b. Sasaran Strategis “Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel

Untuk pencapaian tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua yaitu meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik serta pencapaian sasaran yaitu tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik maka program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel. Hasil capaian program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi capaian target terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.4

Target dan Realisasi Capaian Sasaran “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Cepat, Tepat, Transparan Dan Akuntabel”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020
Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100

Dari Tabel 2.4. diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian realisasi pelaksanaan program ini didukung dengan 2 kegiatan prioritas. Adapun realisasi capaian dari 2 kegiatan mendukung program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2020

yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Capaian realisasi output kegiatan ini 100% yaitu tersusunnya laporan fisik dan keuangan sebanyak 12 laporan yang diinput melalui Aplikasi TP2K tentang sistem monitoring dan pengendalian APBD Provinsi Papua TA. 2020.

2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Capaian realisasi output kegiatan ini 100% yaitu tersusunnya Laporan keuangan SKPD baik administratif sebagai bagian pertanggungjawaban kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pengguna Anggaran dan secara fungsional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Capaian realisasi pada sasaran ini 100% atau “Sangat Baik”

- c. Sasaran Strategis “Terwujudnya pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai kaidah/prinsip-prinsip PBJ”

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai kaidah/prinsip-prinsip PBJ terdiri dari 2 indikator yaitu seperti Tabel 2.5. berikut ini :

Tabel. 2.5

Target dan Realisasi Capaian Sasaran “Terwujudnya Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Sesuai Kaidah/Prinsip-Prinsip PBJ”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020
Terwujudnya pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai kaidah/prinsip-prinsip PBJ	Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa melalui e-procurement	100	100	100
	Rata – Rata Penghematan anggaran melalui e-procurement	5,5	10	6,35

Dari tabel 2.5. diketahui bahwa persentase pemilihan penyedia barang dan jasa melalui e-procurement sebesar 100% dan Rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement sebesar 6,35% dari target 10%. Dibandingkan dengan tahun 2019 penghematan hasil pelaksanaan tender tahun 2020 lebih besar dari tahun 2019 atau meningkat 15,45%. Dari sasaran strategis diatas dapat dijelaskan dengan dukungan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa melalui e-procurement.

capaian target sasaran dengan indikator ini sebesar 100% yang didukung dengan capaian program peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian realisasi output dari kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100% terdiri dari :

1. Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas paket pekerjaan Manajemen Konstruksi, Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa lainnya yang berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi Papua melalui mekanisme tender/seleksi yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018, Perpres 17 Tahun 2019 dan Pergub 14 Tahun 2019 serta aturan dan ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi.

Gambaran pelaksanaan tender/seleksi terhadap paket pekerjaan yang masuk di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2020 yaitu :

Tabel. 2.5.

**Data Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi Pada Biro
Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua
Tahun 2020**

NO	KATEGORI TENDER	JUMLAH DOKUME TENDER SKPD YANG MASUK KE BIRO PBJ	JUMLAH PAKET BATAL TENDER	JUMLAH PAKET GAGAL TENDER	JUMLAH PAKET SELESAI
JUMLAH		388	31	25	332
1	BARANG	25	3	4	18
2	KONSTRUKSI	138	16	10	112
3	JASA KONSULTANSI	212	9	10	193
4	JASA LAINNYA	13	3	1	9

Dari Tabel 2.5. diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah dokumen tender dari SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi yang masuk sebanyak 388 dokumen paket pekerjaan yang akan ditenderkan oleh Pokja Pemilihan PBJ Biro Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua. Dokumen tersebut terdiri dari paket pekerjaan barang sebanyak 25 dokumen, konstruksi 138 dokumen, jasa konsultasi 212 dokumen dan jasa lainnya 13 dokumen. Rincian dokumen yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua setiap bulannya dari 388 dokumen terbanyak pada bulan Nopember sebanyak 198 dokumen dan bulan Juli sebanyak 55 Dokumen, bulan Pebruari sebanyak 24 dokumen dan untuk bulan Desember memasuki akhir tahun pelaksanaan APBD TA. 2020 masih ada dokumen yang masuk untuk di tenderkan sebanyak 24 dokumen dan rata-rata adalah dokumen pelaksanaan paket pekerjaan Multiyears Contract (MYC) terkait dengan pekerjaan mendukung PON XX Tahun 2021. Adapun jumlah dokumen yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Bulan Januari s.d Desember 2020 terlihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik. 2.1. Jumlah Dokumen Tender/Seleksi Dari SKPD yang Masuk ke Biro PBJ Tahun 2020

- Data Pembatalan Tender/Seleksi dari SKPD

Dari Tabel 2.5. dapat dijelaskan dari 388 paket dokumen yang masuk sebanyak 31 Dokumen paket pekerjaan yang Batal ditenderkan dengan alasan adanya penarikan dokmen oleh SKPD terkait dengan Paket Pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 khususnya pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua sehubungan dengan kebijakan rasioalisasi anggaran dan

- Data Tender/Seleksi selesai

Dari Tabel 2.5. dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tender/seleksi yang dilaksanakan oleh POKJA Pemilihan tahun 2020 sebanyak 332 paket yang selesai ditenderkan.

- Data Gagal Tender/Seleksi

Dari Tabel 2.5. terlihat bahwa terdapat 25 paket gagal tender terdiri dari jenis pekerjaan pengadaan barang sebanyak 4

paket, manajemen konstruksi sebanyak 10 paket, jasa konsultasi badan usaha sebanyak 10 paket dan Jasa lainnya 1 paket. Alasan terjadi gagal tender yaitu dalam proses pemilihan tidak ada peserta yang memasukan dokumen penawaran, peserta yang memasukan penawaran tidak lulus kualifikasi administrasi, teknis, dan harga serta waktu yang tidak mencukupi untuk dilakukan tender ulang terhadap paket pekerjaan yang ditender ulang.

2. Terbayarnya insentif Pokja pemilihan sesuai surat keputusan Gubernur Papua Nomor 1888.4/298/Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja dan Penetapan Tunjangan Profesi Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua. Namun sejalan dengan pelaksanaan tender yang begitu banyak masih terdapat kekurangan pembayaran insentif Pokja pemilihan untuk Bulan Desember sebesar Rp. 305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah).

- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi

Capain kegiatan ini sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi e- Katalog lokal secara virtual yang diikuti oleh 35 SKPD di Provinsi Papua dan UKPBJ Kabupaten Jayapura dan UKPBJ Kota Jayapura sebagai bagian rencana aksi pelaksanaan pencegahan korupsi sebagaimana hasil rapat secara virtual tanggal 1 Oktober 2020 sesuai surat undangan Deputy Bidang Pencegahan selaku Koordinator Pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi nomor Und/879/KSP.00/10-16/09/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Evaluasi Progres Pelaksanaan E-Katalog Aksi PK 2019-2020 dilakukan Kegiatan “ Sosialisasi E-Katalog” di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melalui metode Video

Confrence (Aplikasi Virtual Zoom) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020.

c. Kegiatan Pendampingan Perencanaan Pengadaan

Capaian realisasi output kegiatan pendampingan perencanaan pengadaan tahun 2020 sebesar 100% terdiri dari terlaksananya reviuw dan penyusunan SOP dan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu telah dilaksanakannya pendampingan Penyusunan RUP bagi SKPD pada aplikasi lokal yang dikembangkan oleh Biro pengadaan barang dan jasa yaitu melalui aplikasi Sistem Pengadaan (SINGA)

d. Peningkatan Kapasitas LPSE

Capaian realisasi output kegiatan peningkatan kapasitas LPSE tahun 2020 sebesar 100% yaitu telah terbayarnya insentif pengelola LPSE selama 1 tahun dalam mendukung pelayanan pengadaan secara elektronik sehingga ditahun 2020 layanan registrasi, verifikasi, kemananan jaringan dalam mendukung pelaksanaan pengadaan secara elektronik dapat berjalan lancar.

e. Peningkatan Jaringan dan Jasa Layanan SPSE

Capaian realisasi output kegiatan peningkatan jaringan dan jasa layanan pengembangan SPSE sebesar 100% yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor mendukung pelayanan SPSE Tahun 2020. Peralatan dan perlengkapan yang didakan antarlain tersedianya UPS 1 unit (Spesifikasi ICA SIN 5100C) sesuai SPK Nomor 602.1/349/RO-LPBJ/2020 tanggal 3 Nopember 2020 dengan penyedia PT. FAHRI JAYA, tersedianya komputer server 1 unit (spesifikasi Thinksystem SR550, uel intel xeon silver 4210 10c 2. ghz 85W,0GB, rai 530-81pcle 12 GB aapter 1 x 750 W,XCC stanar.) sesuai SPK Nomor 602.1/348/RO-LPBJ/2020 tanggal 3 Nopember 2020. Selain itu juga telah diadakan Alat pelindung diri (APD) pencegahan covid 19, alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan juga terlaksananya pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan jaringan dan server.

f. Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Capaian realisasi output kegiatan Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebesar 100% yaitu telah dilaksanakannya pendampingan dan pembinaan serta memfasilitasi pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaan dalam sistem aplikasi pengadaan, dan melayani peserta tender yang ingin mengupload dokumen kualifikasi selama proses tender mengingat pelaksanaan tender secara elektronik masih ada perusahaan yang kesulitan dalam mengupload dokumen perusahaan.

g. Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik

Capaian realisasi output kegiatan Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik sebesar 100% yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi dan refresh serta pendampingan penginputan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) bagi SKPD yang telah dilaksanakan di Ruang Pelatihan Bagian LPSE Biro Pengadaan barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua tanggal 4-6 Nopember 2020.

2. Indikator Persentase Rata – Rata Penghematan Anggaran Melalui e-procurement

Persentase rata-rata penghematan anggaran melalui e-procurement didukung dengan kegiatan monitoring dengan mealukan analisa seberapa besar efisiensi/penghematan anggaran dari hasil pelaksanaan tender/seleksi oleh Pokja Pemilihan PBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua. Nilai penghematan terhadap pelaksanaan tender/seleksi pada tahun 2020 terlihat pada tabel 2.6. berikut ini :

Tabel. 2.6.

**Data Penghematan/Efisiensi Hasil Pelaksanaan Tender/Seleksi
Tahun 2020**

NO	KATEGORI TENDER	JUMLAH PAKET SELESAI	REALISASI PAKET SELESAI TENDER			
			NILA TOTAL HPS	HASIL TENDER	Penghematan (HN-HPS)	%
	JUMLAH	332	2.117.698.528.303	1.983.275.464.156	134.423.064.147	6,35%
1	BARANG	18	95.573.217.945	89.471.162.569,22	6.102.055.376	6,38%
2	KONSTRUKSI	112	1.766.600.787.569	1.650.058.811.282,79	116.541.976.287	6,60%
3	JASA KONSULTANSI	193	141.165.707.666	131.042.043.394,00	10.123.664.272	7,17%
4	JASA LAINNYA	9	114.358.815.123	112.703.446.909,80	1.655.368.213	1,45%

Dari Tabel 2.5 diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 332 paket yang selesai proses pelaksanaan tender diperoleh rata-rata jumlah penghematan anggaran sebesar 6,35% yaitu selisih antara Nilai Hasil Tender dengan Nilai HPS. Persentase penghematan ada pada pada paket jasa konsultasi sebesar 7,17%, diikuti paket pekerjaan konstruksi 6,60%, paket pekerjaan pengadaan barang 6,38%, paket dan persentase terkecil pada paket jasa lainnya. .

d. Sasaran Strategis ““Terwujudnya penyelesaian sanggahan dan pengaduan”

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pendampingan Hukum dan Sanggah adalah :

- Untuk memberikan pendapat hukum terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro PBJ ;
- Untuk memberikan pendampingan kepada Pokja Pemilihan dalam hal menjawab sanggahan dari peserta tender;
- Untuk menginventarisir sanggahan terhadap pelaksanaan tender;
- Untuk menganalisis permasalahan hukum terhadap sanggahan dari peserta tender.

Capaian realisasi output kegiatan ini sebesar 100% yaitu terlaksananya pendampingan hukum dan sanggah terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan tender/seleksi pengadaan barangdan jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan PBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA

Provinsi Papua. Dari 357 paket pekerjaan yang berproses dalam pelaksanaan pemilihan tender/seleksi tahun 2020 terdapat 62 paket tender yang disanggah oleh peserta tender kepada kinerja Pokja pemilihan PBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua. Jumlah sanggahan tahun 2020 terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7.

**Data Capaian Realisasi Sanggah Dan Pengaduan
Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	REALISASI 2020
Terwujudnya penyelesaian sanggahan dan pengaduan	Persentase sanggahan yang diselesaikan	100	100	100

Tabel 2.7. menunjukkan bahwa dari paket tender yang disanggah 100% terselesaikan. Namun dari proses penyelesaian sanggah sebanyak 1 paket yang gagal tender dikarenakan waktu pelaksanaan tender yang sudah tidak dapat dilaksanakan. Data sanggah pelaksanaan tender/seleksi tahun 2020 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.8.

**Data Jumlah Sanggah Pelaksanaan Tender/Seleksi Pada Biro
Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua
Tahun 2020**

KATEGORI PAKET PEKERJAAN	JUMLAH SANGGAHAN (PAKET)	SANGGAHAN TERJAWAB DAN PROSES TENDER BERJALAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN PEMENANG	GAGAL TENDER
BARANG	3	4	-
KONSTRUKSI	22	21	1
KONSULTANSI	32	32	-
JASA LAINNYA	2	4	-
JUMLAH	59	58	1

Dari tabel 2.8. diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan proses pemilihan PBJ pada tahun 2020 sebanyak 59 paket tender/seleksi yang disanggah oleh peserta tender dengan rincian sanggahan terbanyak pada paket pekerjaan Konsutansi sebanyak 32 sanggahan, diikuti oleh paket pekerjaan konstruksi sebanyak 22 sanggahan, paket pekerjaan pengadaan barang 3 sanggahan dan jasa lainnya 2 sanggahan. Dari 59 sanggahan sebanyak 58 paket tender/seleksi telah dijawab pokja dan proses tender/seleksi berproses sampai dengan selesai, sedangkan untuk paket konstruksi dari 21 sanggahan sebanyak 20 sanggahan telah dijawab pokja dan berproses sampai dengan selesai tender, sedangkan 1 sanggahan setelah dilakukan evaluasi atas sanggahan tersebut dan waktu pelaksanaan tender yang tidak mencukupi maka paket tersebut gagal. Secara rinci data sanggahan peserta tender tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran.

2.3. ISU-ISU PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2020

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan kualitas SDM dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan di lingkup pengadaan barang dan jasa belum optimal.
- 2) Belum terpenuhinya jabatan fungsional PPBJ permanen pada Biro PBJ.
- 3) Belum memadainya SDM pengelola PBJ, sarana prasarana termasuk akses jaringan internet.
- 4) Data pengusaha lokal atau Orang Asli Papua (OAP) belum terintegrasi dengan SPSE dan Aplikasi perencanaan dan penganggaran.
- 5) Belum terpenuhinya standarisasi LPSE yang berpengaruh pada

pencapaian tingkat kematangan UKPBJ.

- 6) Situasi penyebaran Covid 19 terhadap pelaksanaan kegiatan

2.4. RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

Sesuai Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 yang merupakan tahapan ke tiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dimana sesuai kondisi kondisi yang sedang berlangsung (existing condition) dalam pembangunan yang tengah dilakukan. Terkait kondisi yang sedang berlangsung permasalahan yang sedang dihadapi adalah merebahnya wabah Covid-19 yang sampai hari ini belum bisa diatasi dengan maksimal. Perumusan tema pembangunan nasional pun mengalami pergeseran yang tadinya **“Meningkatkan Industri, Pariwisata Dan Investasi Di Berbagai Wilayah Didukung Oleh SDM, Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”**. Rumusan tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 pun juga mengalami penyesuaian, semula **“Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan”**, menjadi : **Pemulihan Kehidupan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Hidup, Dan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.**

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan RENJA 2022 telah ditampung semuanya dalam RKPD, Oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan baik penambahan maupun penghapusan. Renja Tahun 2022 terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka perlu penyelarasan Arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Papua khususnya berkaitan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri telah dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu penyelarasan dengan arah kebijakan nasional dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan peningkatan keadilan, transparansi dan profesionalisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Kementerian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang termuat dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja rogram/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	Persen	5

2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik	Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ	Persen	85
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Persen	60
		Tingkat Kematangan UKPJ	Level	3
		Persentase Sanggahan/pengaduan yang terselesaikan	Persen	100
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	BB

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Papua sebesar Rp. **31,240,830,110**. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 serta prakiraan maju Tahun 2023 seperti yang tersaji padatabel 3.1 berikut ini :

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

Tabel 3.1.

Recana Kerja Program dan kegiatan Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH									31,240,830,110	56,795,000,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									11,465,830,110	18,045,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan (RENJA/RKA/DPA/RKA P/DPAP)	4 Dokumen			200.000.000	230.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Jumlah dokumen	2 Dokumen			-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Jumlah dokumen	2 Dokumen			-	-	

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Jumlah dokumen laporan	1 Laporan			25.000.000	27.500.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Gaji dan tunjangan dibayarkan selama	14 Bulan			7.979.430.000	8.777.373.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan			30.000.000	33.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Jumlah dokumen laporan	12 Laporan			35.000.000	38.500.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Provinsi			Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan			25.000.000	27.500.000	

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Sipil Harian	100 stel	150.000.000	165.000.000
			Jumlah Pakain Batk	100 Stel	55.000.000	60.500.000
			Jumlah Pakain Olahraga		33.000.000	36.300.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	200,000,000	200,000,000
			Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasiperaturanperundang-undangan	15 Orang	-	500,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta bimbinganteknis tentangimplementasi peraturanperundang-undangan	100 Orang	-	450,000,000

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	10 Unit			200,000,000	500,000,000	
						Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	10 Unit					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perlatan gedung kantor yang di sediakan	10 Unit			120,000,000	130,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis			700,000,000	800,000,000	
						Jumlah penggandaan	15000 Lembar					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis			75,000,000	300,000,000	
Penyediaan Bahan/Material	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis ATK yang disediakan	24 Jenis			618,617,240	1,100,000,000	

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

Fasilitasi Kunjungan Tamu	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	11000 Kali Tahun			1,200,000,000	1,500,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	100 Orang			1,000,000,000	2,000,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda 4 yang disediakan	1 Unit			-	1,500,000,000	
Pengadaan Mebel	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit			250,000,000	350,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat			336,000,000	700,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Keamanan yang disediakan	84 Orang Bulan			450,000,000	450,000,000	
					Jasa Kebersihan yang disediakan	24 Orang Bulan						

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 Unit			350,000,000	350,000,000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset kantor yang dipelihara	10 Unit			100,000,000	250,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rehabilitasi gedung/bangunan lainnya	1 Unit			-	500,000,000	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										19,775,000,000	38,750,000,000	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen	2 dokumen			500,000,000	1,500,000,000	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah layanan tender pada BPBJ	35 SKPD			11,500,000,000	25,000,000,000	
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Monitoring	1 Laporan			500,000,000	1,500,000,000	

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengelolaan SPSE	3 Sistem			4,000,000,000	5,000,000,000	
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SKPD Pengguna SPSE yang terlayani	35 SKPD			500,000,000	750,000,000	
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aplikasi sistem informasi yang dikelola	5 Aplikasi			200,000,000	500,000,000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan	50 Orang			500,000,000	1,000,000,000	
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UKPBJ yang dibina	29 Institusi			800,000,000	2,000,000,000	
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 Dokumen			1,275,000,000	1,500,000,000	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari Prakiraan Strategis (RENSTRA) dan Prakiraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua (RPJMD) tahun 2019-2023 yang disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua pada Tahun 2022.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Jayapura, 2021


Kepala Biro,
DEBORA D. SALOSSA, S.Hut, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19771223 200212 2 010